

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini faktor yang diteliti adalah kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita selama kurun waktu 2006 -2014. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil analisis diperoleh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/kota DIY. Bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/kota DIY. Artinya semakin besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh tiap daerah di kabupaten/kota maka akan berpengaruh meningkatkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan asli daerah pada tiap kabupaten/kota DIY berasal dari pembayaran masyarakat wajib pajak. Adanya jumlah pungutan wajib pajak yang besar menyebabkan masyarakat harus mengalokasikan pendapatan perkapitanya lebih besar pula. Sehingga secara sistematis saving lebih rendah dari pada pengeluaran. Jumlah PAD yang di alokasikan ke sektor kemiskinan cenderung rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin..
2. Hasil pengujian dalam penelian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/kota DIY. Menurut Suparwati (2012) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Dikarenakan pengaruh DAU secara langsung bisa menurunkan angka kemiskinan, presentase dana DAU dari pemerintah yang dialokasikan ke Kabupaten/kota di DIY dirasa sudah mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya. Sebaiknya pemerintah terus menambah DAU agar kemiskinan bias turun. Karena DAU mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam pengentasan kemiskinan.

3. Dari hasil analisis diperoleh dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/kota DIY. Hal ini sesuai dengan tujuan Dana Alokasi Khusus menurut Kuncoro (2010) bahwa Dana Alokasi Khusus untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang tidak memadai.
4. Dari hasil analisis PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota DIY. Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan PDRB perkapita yang terjadi di Kabupaten/kota di DIY selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan di Kab/kota DIY, yang mana dapat dilihat dari data pengangguran, karena ketika pengangguran menurun maka PDRB perkapita akan naik dan setiap masyarakat mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak menjadi masyarakat yang termasuk golongan miskin.

5.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang sudah didapatkan dari hasil penelitian ini, penulis membuat beberapa saran untuk pemerintah dan penelitian selanjutnya yakni:

1. Pemerintah pusat sebaiknya dapat meningkatkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan ekonomi di daerah dan memberikan wewenang kepada daerah untuk memajukan pembangunan ekonomi agar daerah tidak menggantungkan kepada pemerintah pusat.
2. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi di harapkan dapat menurunkan angka kemiskinan akan tetapi Pendapatan Asli Daerah Provisi DI Yogyakarta tidak menurunkan angka kemiskinan di karenakan alokasi untuk mengentaskan kemiskinan kurang. Jika melihat sumber PAD maka berasal dari pungutan wajib pajak. Oleh karena itu ketika PAD yang tinggi dan berasal dari pungutan pajak akan tetapi alokasi untuk kemiskinan sedikit maka PAD yang tinggi tidak dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Pemerintah daerah di harapkan dapat mendistribusikan alokasi Pendapatan Asli Daerah untuk mengentaskan kemiskinan agar kesejahteraan semakin merata.
3. Bagi peneliti selanjutnya dalam pengambilan data diharapkan lebih baik lagi dan menggunakan analisis yang berbeda.